

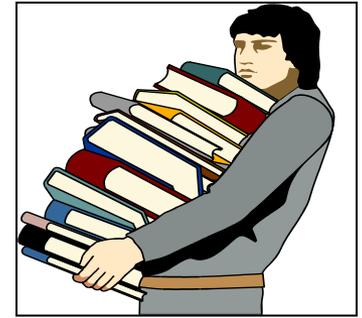
ANALISIS Kebijakan Publik



TIM PENGAJAR :

1. Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si. *
2. Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP.

Literatur :



1. Handbook Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode) – **Frank Fischer, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney, 2015.**
2. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan – **Wayne Parsons, 2008.**
3. Pengantar Analisis Kebijakan Publik – **William N. Dunn, 2005.**
4. Analisis Kebijakan – **Riant Nugroho, 2018.**
5. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis – **Dwiyanto Indiahono, 2017.**

Literatur:



6. Analisis Kebijakan – **Solichin Abdul Wahab, 2016.**
7. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik – **Joko Widodo, 2015.**
8. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus) – **Budi Winarno, 2012.**
9. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi – **Subarsono, 2006.**

Deskripsi Mata Kuliah :



Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang disajikan pada semester IV bagi mahasiswa Prodi Adm. Publik ini, mempelajari mengenai urgensi, pendekatan dan model analisis kebijakan publik, serta evaluasi kebijakan publik dan model-modelnya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah menyelesaikan mata kuliah Analisis Kebijakan Publik pada akhir semester, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan publik dengan cara menguraikan langkah-langkah analisis kebijakan publik.



Mengapa Mata Kuliah ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Penting bagi Mhswa Adm. Publik :



- Memiliki pengetahuan tentang kebijakan & proses kebijakan bagi para penentu kebijakan, para analis penerima kebijakan, dan analis independen (*policy stakeholders*)
- Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik
- Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan
- Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah
- Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (mendeskripsi, menganalisis, menjelaskan sebab-akibat tindakan pemerintah).

Topik Perkuliahan INTRODUCTION



- Pendahuluan
- Konsep & Lingkup Kebijakan Publik
- Alasan Studi Kebijakan Publik
- Siklus & Sistem Kebijakan Publik





PENGERTIAN Kebijakan Publik

Thomas
R. Dye

Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Edward
III &
Sharkansky

Apa yang dikatakan & dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Anderson

Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Udoji

Tindakan bersanksi yg mengarah pada tujuan tertentu pada masalah yg saling berkaitan yg mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Jenkins

Serangkaian keputusan aktor politik yg saling berkaitan berkenaan dgn tujuan yg dipilih beserta cara-cara utk mencapainya dlm suatu situasi.

**Hugh
Heglo**

Tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

**Laswell
&
Kaplan**

Serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktek/tindakan.

**David
Easton**

Kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

KP dibuat oleh badan pemerintah, bukan swasta

KP memiliki tujuan & sasaran yang jelas

kebijakan

KP menyangkut pilihan atau tidak melakukan

KP mengandung & mengalokasikan nilai-nilai kpd masyarakat

LINGKUP Kebijakan Publik



ALASAN Studi Kebijakan Publik



Alasan ILMIAH / AKADEMIK

Alasan PROFESIONAL

Alasan POLITIS

Alasan ILMIAH / AKADEMIK



- Alasan ilmiah/akademik merujuk pada **pengembangan ilmu pengetahuan.**
- Maka, studi KP untuk memperoleh pengetahuan yg lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan publik, berikut proses-proses yg mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat.

Sederhananya: Keingintahuan tentang proses pembuatan kebijakan publik.

Alasan PROFESIONAL

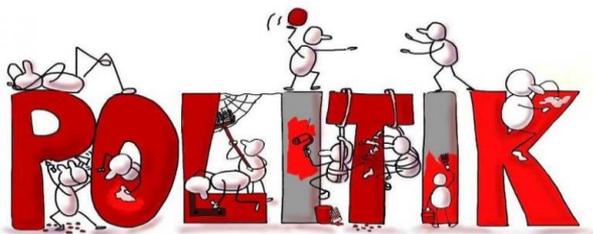


- Sbg upaya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna dapat membantu memberikan masukan dalam memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
- Sbg dasar teoritis ttg bagaimana kebijakan yg baik dan memperkecil potensi kegagalan dari suatu kebijakan sehingga ke depan akan melahirkan kebijakan yg lebih berkualitas.
- Upaya untuk merancang kebijakan publik yg lebih efisien dan efektif.

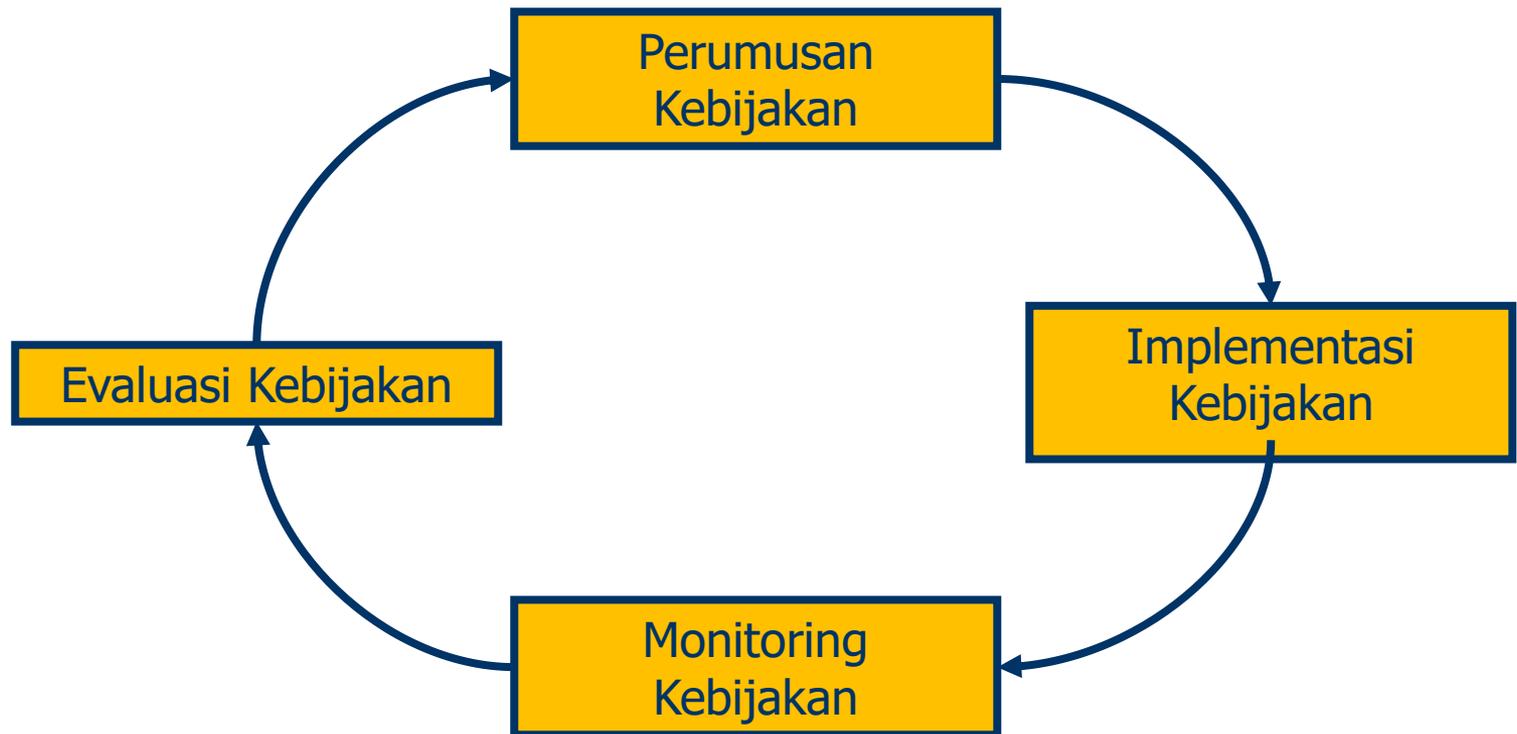
Alasan POLITIS



- Pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijaksanaan yg tepat guna mencapai tujuan yg tepat pula.
- Kebijakan yang kuat, haruslah didukung dengan teori, asumsi yang kuat. Maka lawan politik tidak bisa sembarangan mengkritik kebijakan, sehingga kebijakan didukung berbagai kalangan.

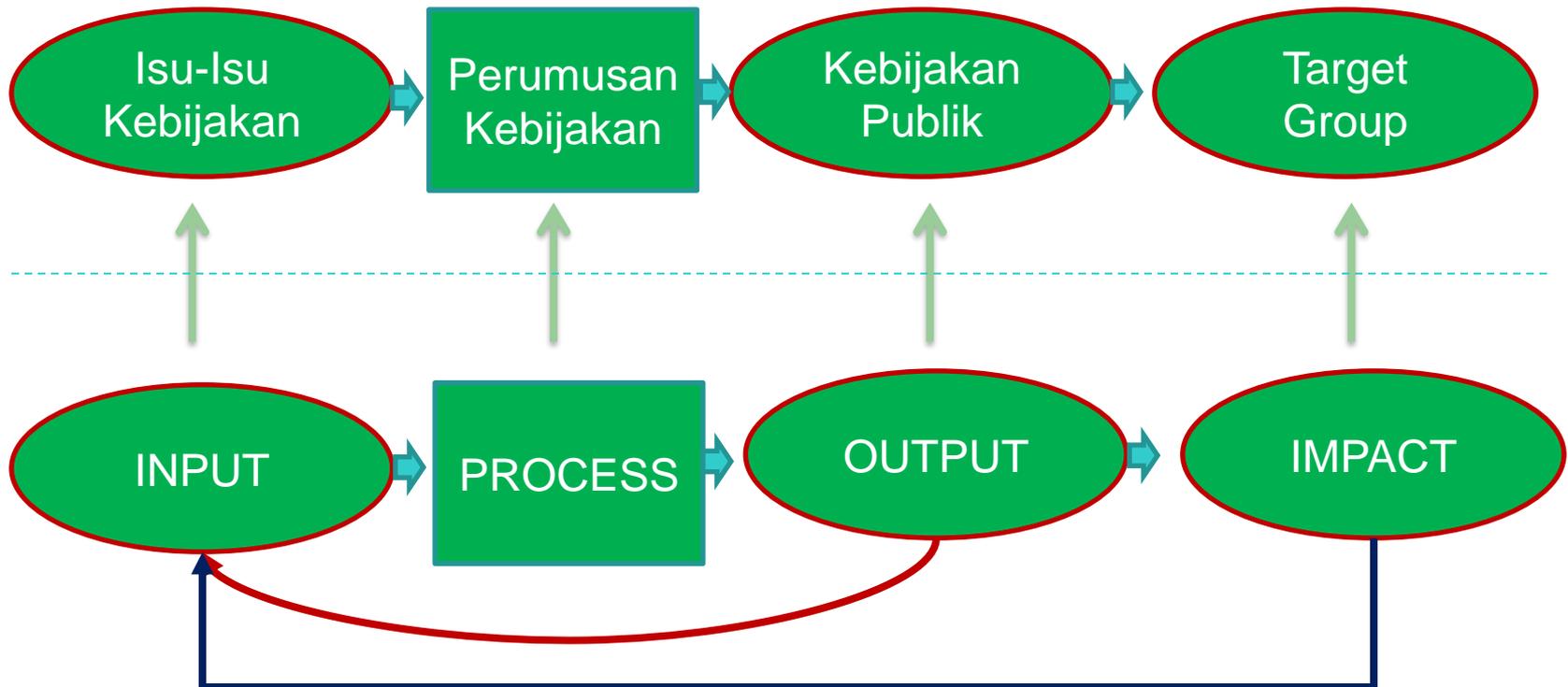


SIKLUS Kebijakan Publik





SISTEM Kebijakan Publik



Topik Perkuliahan ANALISIS KP



- Konsep & Sifat AKP
- Komponen AKP
- Model & Pendekatan AKP
- Prosedur AKP
- Variasi Kegiatan AKP
- Tahap / Proses AKP & Karakteristiknya
- Siklus Lengkap AKP



DEFINISI Analisis Kebijakan Publik

Weimer
& Vining

Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dgn menggunakan kriteria-kriteria yg relevan agar diperoleh alternatif terbaik utk dijadikan tindakan kebijakan

Dunn

Aktivitas intelektual dan praktisi yg ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai & mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan

Bauer &
Gregen

Aktivitas menciptakan pengetahuan “tentang dan dalam” proses kebijakan

Indiahono

Serangkaian aktivitas utk menciptakan solusi terbaik atas masalah publik yang dihadapi

SIFAT ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Multidisipliner



- Karena meminjam teori, metode dan teknik dari ilmu sosial lain: ilmu ekonomi, ilmu politik, sosial, psikologi, dll.
- Dapat diterapkan (ilmu terapan).
- Diawali pada thn 1970-an: Studi Kebijakan Publik, Harold D. Laswell → *policy sciences*

KOMPONEN Analisis Kebijakan Publik





MODEL Analisis Kebijakan Publik

Model ELIT

KP merupakan preferensi nilai-nilai elit yg berkuasa; elit membentuk opini masyarakat; lembaga politik maupun lembaga masyarakat didominasi sekelompok individu (elit).

Model PLURALIS

Proses politik di negara mendasarkan diri pada sistem demokrasi; shg tdk ada perbedaan antara elit & massa; tdk ada dominasi dlm pembuatan keputusan; terdpt byk pusat kekuasaan di dlm komunitas.

PENDEKATAN

Analisis Kebijakan Publik (by Dunn)

PENDEKATAN	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan akankah ada? (fakta)	Deskriptif dan prediktif
Valuatif	Apa manfaatnya? (nilai)	Valuatif
Normatif	Apakah yang harus diperbuat? (aksi)	Preskriptif atau rekomendasi

PROSEDUR UMUM dalam Analisis Kebijakan Publik (by Dunn)



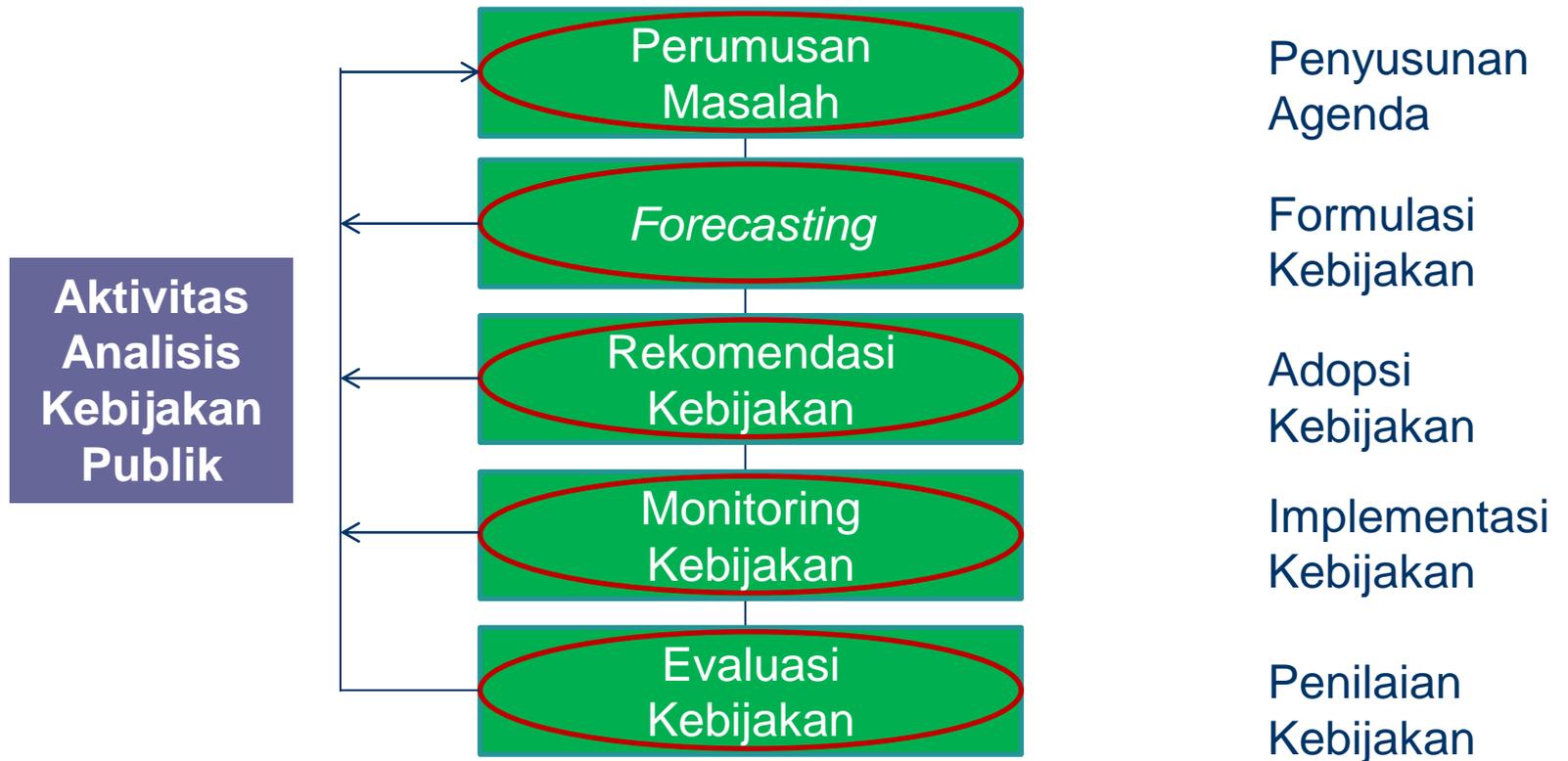
VARIASI KEGIATAN

Analisis Kebijakan Publik

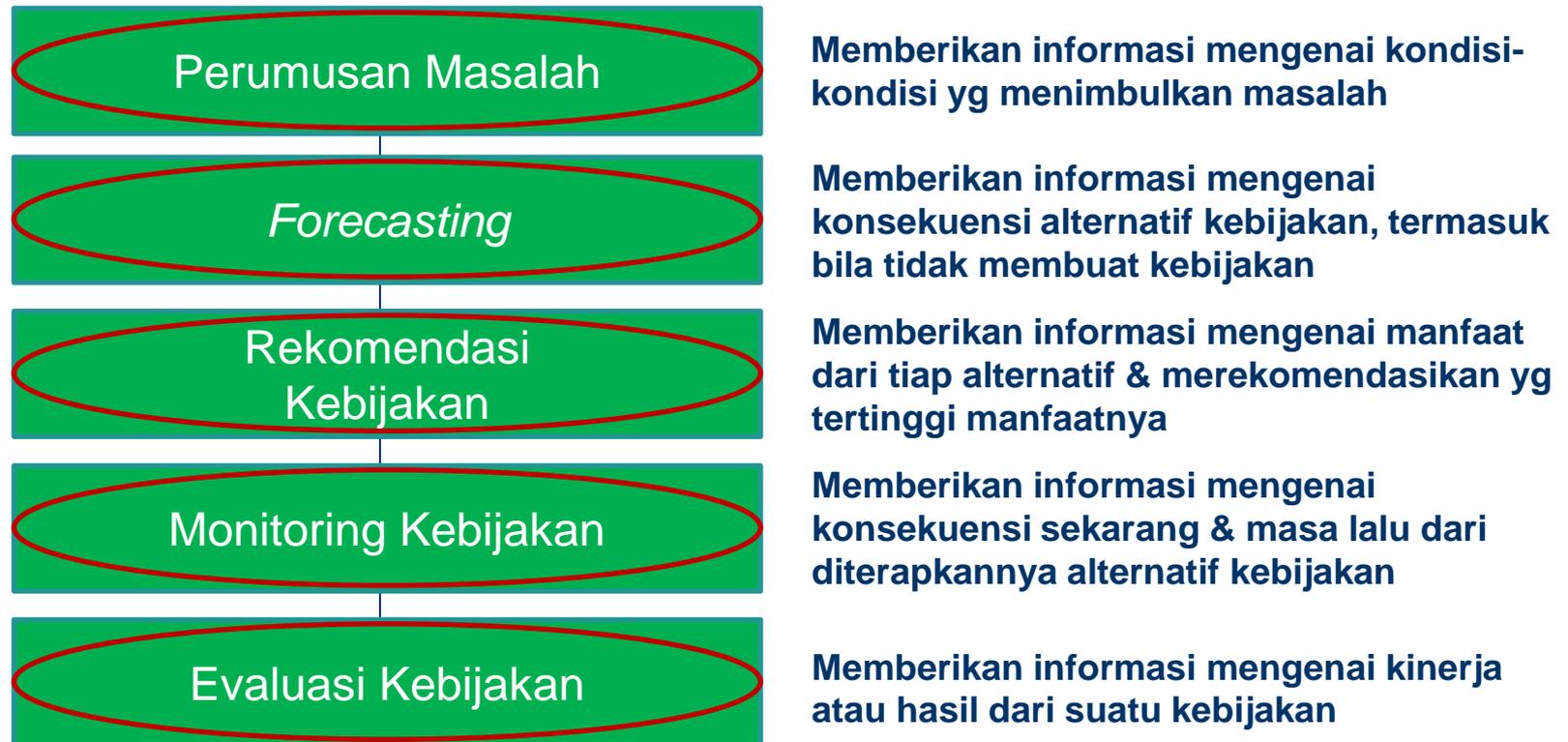
- a) Studi-studi isi kebijakan (*studies of policy content*).
- b) Studi-studi ttg proses kebijakan (*studies of policy process*)
- c) Studi-studi mengenai output-output kebijakan (*studies of policy outputs*)
- d) Studi-studi evaluasi (*evaluation studies*).
- e) Studi ttg informasi untuk pembuatan kebijakan (*information for policy making*)
- f) Proses kepenasihatatan (*advocacy process*)
- g) Nasihat kebijakan (*policy advocacy*).

TAHAP / PROSES

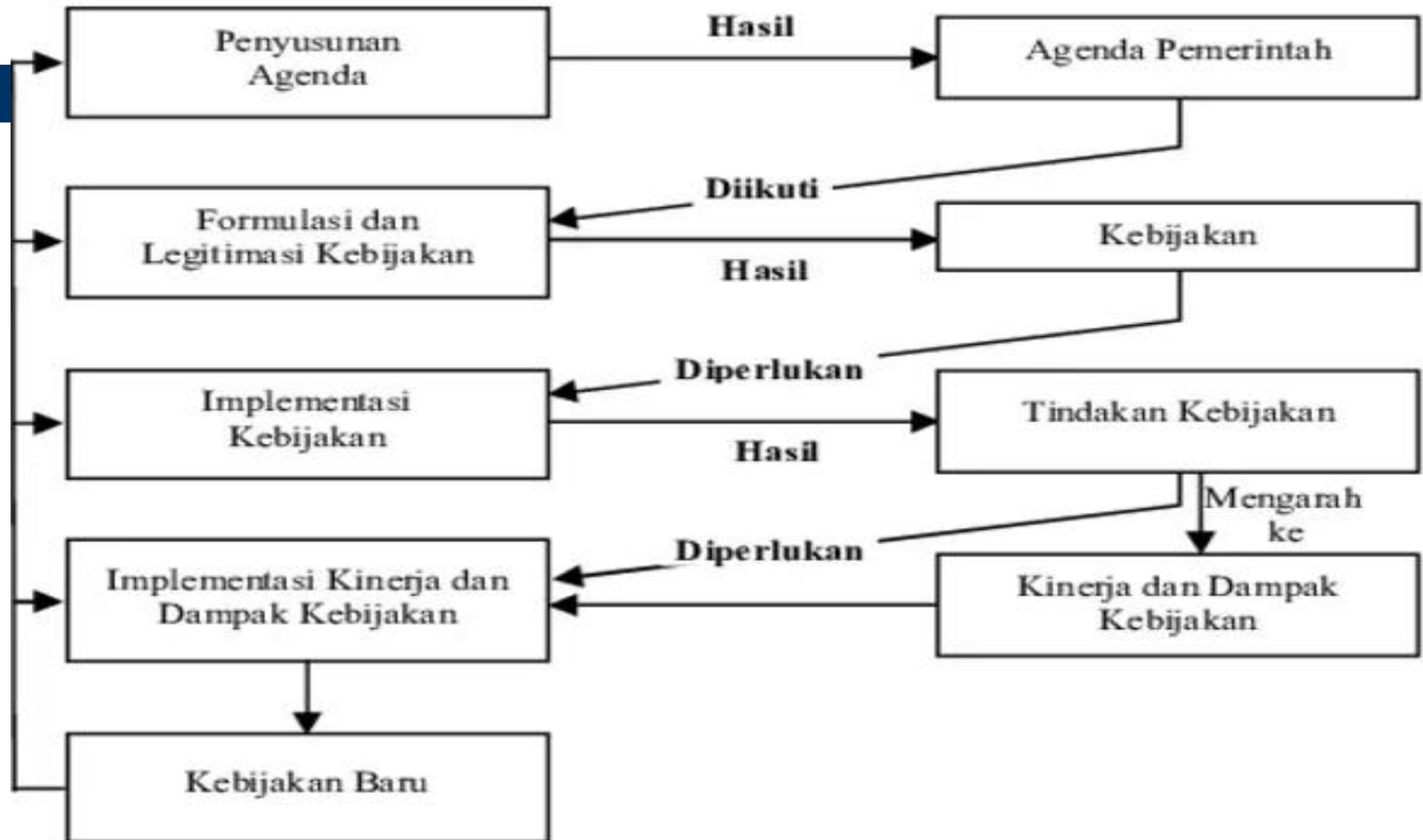
Analisis Kebijakan Publik (by Dunn)



KARAKTERISTIK Tahap Analisis Kebijakan Publik



SIKLUS LENGKAP Analisis Kebijakan Publik (by Ripley)



Topik Perkuliahan PERUMUSAN MSLH



- Pendahuluan
- Definisi Masalah Kebijakan
- Ciri, Sifat & Struktur Masalah Publik
- Tahapan Perumusan Kebijakan
- Metode Perumusan Kebijakan
- Penyusunan Agenda sbg Hasil Tahap Perumusan Masalah



Tahap 1. PERUMUSAN MASALAH



- Perumusan Mslh: Aktivitas utk merumuskan mslh kbjkn berdasarkan sebab-sebab, kondisi-kondisi dan yg melatarbelakangi mslh.
- Perumusan Mslh Kbjkn merupakan bagian dari analisis kbjkn yg selama ini **KURANG MENDAPAT PERHATIAN** padahal **bersifat krusial**.
- Kegagalan analisis kbjkn seringkali **karena memecahkan mslh yg salah dirumuskan** dibandingkan **karena menemukan solusi yg salah thdp mslh yg benar**.

Mengapa itu terjadi?



1. Karena subjektivitas, atau kepentingan analis/*policy makers* sangat menonjol
 2. Kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan *policy makers*
- Maka dari itu, sangat penting utk memahami apa itu **MASALAH KEBIJAKAN**.

Definisi MASALAH KEBIJAKAN

- **Anderson:** Adalah kondisi atau situasi dimana prosedur dibutuhkan atau ketidakpuasan pada sebagian masyarakat dimana bantuan atau kesiapan dibutuhkan.
- **Dunn:** Adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan-kesempatan yg tidak terealisasi, tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik.





MASALAH PRIVAT

Mslh-mslh yg memiliki akibat / dampak terbatas satu / bbrp org yg terlibat langsung. Bersifat relatif krn mslh privat dpt menjadi mslh publik jk individu / seseorang mampu mempengaruhi masyarakat melalui tindakan yg dilakukannya



MASALAH PUBLIK

Mslh-mslh yg dpt membangkitkan minat byk pihak melakukan sesuatu utk mengatasinya. Selalu berkaitan antara satu pihak dgn pihak lainnya. Memiliki dampak yg luas & mencakup konsekuensi bagi org-org yg tdk secara langsung terlibat.

Ciri-ciri masalah privat & publik

SIFAT Masalah Publik



- **Obyektif:** Karena keberadaan situasi mslh ditandai oleh adanya fakta / data tertentu. Kondisi obyektif itu mencerminkan adanya jarak antara situasi yg ada dgn situasi ideal yg diharapkan.
- **Subyektif:** Karena kondisi obyektif itu dimaknai secara subyektif oleh setiap stakeholder tergantung pd nilai, ideologi atau kepentingannya. Shg **mslh merupakan konstruksi sosial.**

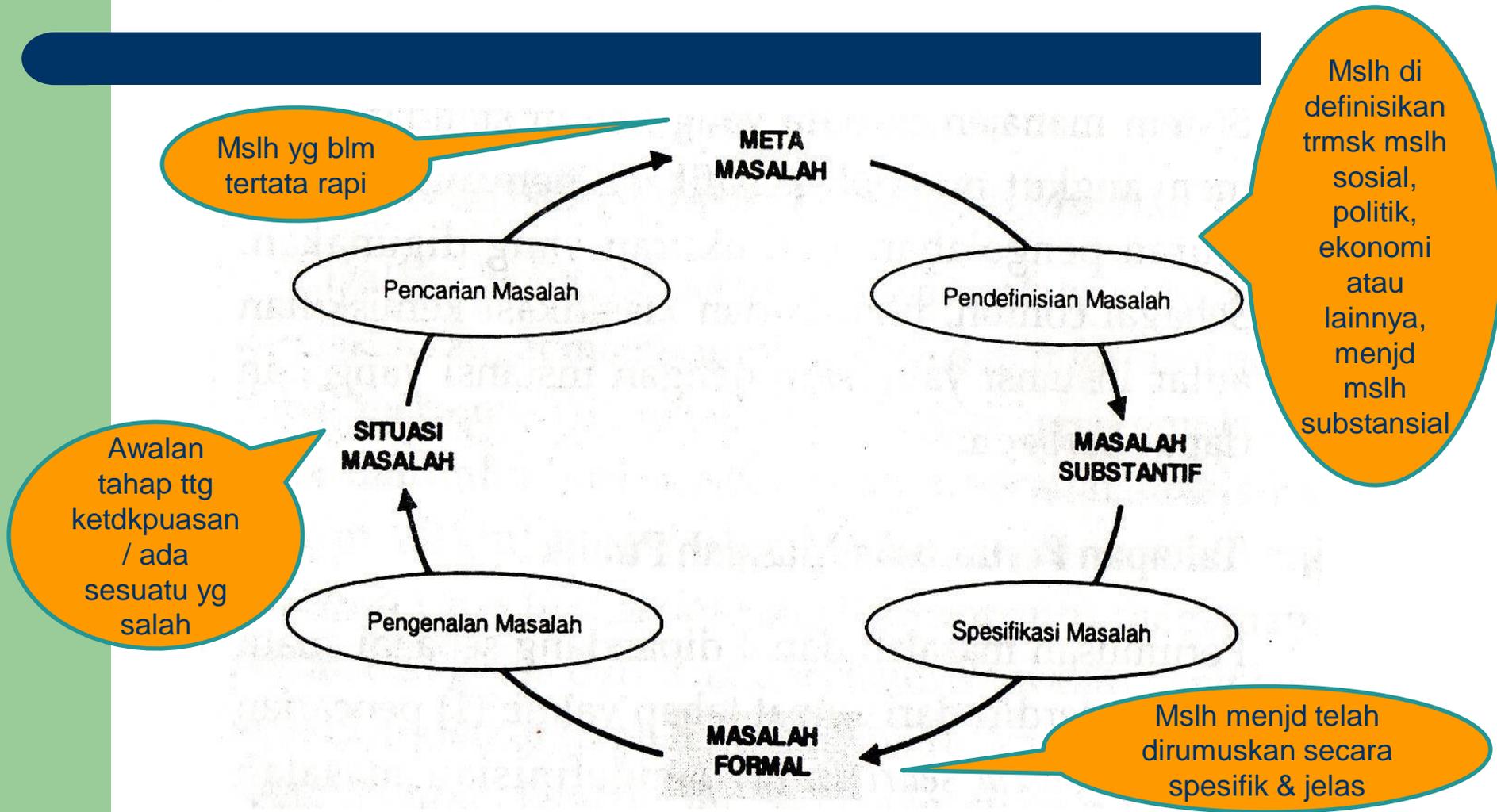
STRUKTUR Masalah Publik (by Dunn)

No	Elemen	Struktur Masalah		
		Sederhana (Well Structured)	Agak Sederhana (Moderately Structured)	Rumit (ILL Structured)
1	Pengambilan keputusan	1 atau bbrp	1 atau bbrp	Banyak
2	Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tak terbatas
3	Kegunaan (nilai)	Konsensus	Konsensus	Konflik
4	Hasil	Pasti / beresiko	Tdk pasti	Tdk diketahui
5	Probabilitas	Dpt dihitung	Tdk dpt dihitung	Tdk dpt dihitung
Contoh		Penghentian PNS	Pembebasan Tanah	Kemiskinan, Kriminalitas

Masalah publik yg tipe ILL STRUCTURED, butuh pemahaman mendlm dari analisis kbjkn



TAHAPAN dlm Perumusan Masalah (by Dunn)



CONTOH

Perumusan Masalah Kebijakan

No	Tahapan	Masalah
1	Situasi masalah	PKL mengganggu penduduk
2	Meta masalah	<ul style="list-style-type: none">● Tempat PKL tidak tertata rapi● PKL tumbuh subur● PKL produk sampah● PKL mengganggu keindahan kota● Perilaku PKL seenaknya
3	Masalah substantif	<ul style="list-style-type: none">● PKL tumbuh subur● Tempat PKL tidak tertata rapi● Perilaku PKL
4	Masalah formal	<ul style="list-style-type: none">● Perilaku PKL

METODE Perumusan Masalah

- Adalah cara utk mengenali, mendefinisikan & merumuskan mslh shg mslh tsb dpt dipahami dgn baik (Subarsono, 2006).

ANALISIS BATAS

Metode utk meyakinkan tgkt kelengkapan dari serangkaian representasi mslh melalui 3 proses lgkh (pencarian snowball, representasi mslh & estimasi batasan)

ANALISIS KLASIFIKASI

Metode utk memperjelas konsep yg digunakan dlm mendefinisikan situasi mslh dgn cara mengklasifikasikan mslh ke dlm kategori2 tertentu utk memudahkan analisis

ANALISIS HIRARKI

Metode mengidentifikasi mslh berdasarkan sebab2 yg mungkin

BRAINSTORMING

Metode memunculkan ide, tujuan & strategi tertentu yg membantu identifikasi dan konseptualisasi situasi mslh melalui curah pendapat dari org2 yg mengetahui kondisi mslh

ANALISIS PERSPEKTIF GANDA

Metode utk memperoleh pandangan yg bervariasi dari perspektif yg berbeda mengenai suatu mslh & pemecahannya

Penyusunan Agenda atau AGENDA SETTING sebagai Hsl Perumusan Masalah



- *Agenda setting*: suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana isu-isu (*issues*) itu muncul pada agenda pemerintah yg perlu ditindaklanjuti berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- Howeltt and Ramesh (1995) : Proses dimana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dlm masyarakat diterjemahkan ke dlm butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah.

...Penyusunan Agenda / AGENDA SETTING



Yg harus dilakukan:

- Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah
- Membuat batasan masalah
- Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah

Agar Masalah Publik menjadi AGENDA SISTEMATIK



- **Systematic Agenda** terdiri atas isu-isu yg dipandang secara umum oleh anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian dari pemerintah & mencakup masalah-masalah yg berada dlm kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing.
- **Ada 3 prasyarat:**
 1. Isu itu memperoleh perhatian yg luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
 2. Adanya persepsi/pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan utk mencegah masalah itu.
 3. Adanya persepsi yg sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab yg sah dari pemerintah utk memecahkannya.

Agar Agenda Sistematis menjadi AGENDA PEMERINTAH

- **Government Agenda:** serangkaian masalah yg secara eksplisit memerlukan pertimbangan-pertimbangan yg aktif & serius dari pembuat kebijakan yg sah.
- **Ada faktor-faktor pendorongnya:**
 1. Apabila terdapat ancaman thdp keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-kelompok tsb akan mengadakan reaksi & menuntut adanya tindakan pemerintah utk mengatasi ketidakseimbangan tsb.
 2. Para pemimpin politik dpt menjadi faktor penting dlm penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik, karena didorong adanya pertimbangan politik dan karena memperhatikan kepentingan umum, selalu memperhatikan mslh-mslh masyarakat & mengusulkan upaya-upaya pemecahannya.

agendA



- **Lanjutan faktor-faktor pendorongnya:**

3. Menimbulkan krisis / peristiwa luar biasa yg dpt menyebabkan suatu masalah masuk ke dlm agenda pemerintah.
4. Adanya gerakan-gerakan protes, termasuk tindakan kekerasan, merupakan salah satu penyebab yg dpt menarik perhatian pembuat kebijakan & memasukannya ke dalam agenda pemerintah.

Topik Perkuliahan **PERAMALAN / *FORECASTING***



- Pendahuluan
- Tujuan & Bentuk Peramalan
- Jenis Masa Depan
- Obyek Peramalan
- Alternatif Kebijakan sbg Hasil Tahap Peramalan
- Metode Pengembangan Alternatif Kebijakan





Tahap 2. PERAMALAN (*FORECASTING*)

- Peramalan: Aktivitas utk merumuskan mslh kbjkn berdasarkan sebab-sebab, kondisi-kondisi dan yg melatarbelakangi mslh.
- Dgn peramalan, akan diketahui seperti apa **KONDISI SOSEKPOL DI MASA DEPAN**, yg kemudian dpt dilakukan **intervensi melalui kebijakan pemerintah**.
- Shg peramalan merupakan prosedur utk membuat informasi faktual ttg situasi sosial masa depan atas dasar informasi yg telah ada ttg mslh kbjkn (Dunn).

TUJUAN Peramalan/Forecasting

1. **Melakukan kontrol & intervensi kebijakan** guna mempengaruhi perubahan shg akan mengurangi resiko yg lebih besar.
2. **Memberikan informasi** mengenai kbjkn di masa depan beserta konsekuensinya.

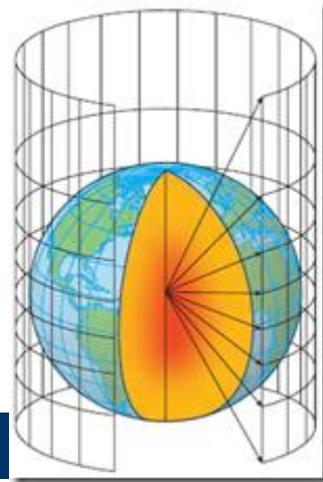




BENTUK Peramalan/Forecasting

1. **Proyeksi:** Ramalan yg didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan.
2. **Prediksi:** Ramalan yg didasarkan pada asumsi teoritis yg tegas.
3. **Perkiraan:** Ramalan yg didasarkan pada penilaian yg informatif atau penilaian pakar ttg situasi masyarakat masa depan.

Contoh PROYEKSI



- Kita dapat menghitung proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 berdasarkan data jml penduduk selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020,
- Proyeksi dapat menggunakan **model matematika dan regresi**.
- Rumus angka pertumbuhan penduduk:

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Jmlh penduduk thn terakhir = Jmlh penduduk tahun awal (1 + Angka Pertumb. Penduduk) Lama Wkt

Contoh



- **Teori *supply dan demand*** menyatakan bahwa “*harga normal akan terjadi pada titik temu antara supply dan demand*”.
- Karena itu, ketika S dan D tidak seimbang, misalnya D meningkat sedangkan S tetap, maka akan lahir *black market*, dan kondisi ini memberikan peluang bagi terjadinya “*korupsi*”.

Contoh PERKIRAAN



- Perkiraan berusaha utk dapat memperoleh dan mensintesisikan pendapat-pendapat atau penilaian-penilaian para ahli.
- Penilaian dapat berbentuk **penilaian yg intuitif** – yg diasumsikan adanya kekuatan batin dan kreatif dari para intelektual atau berbentuk pengetahuan terpendam dari para pelaku kebijakan.

JENIS Masa Depan



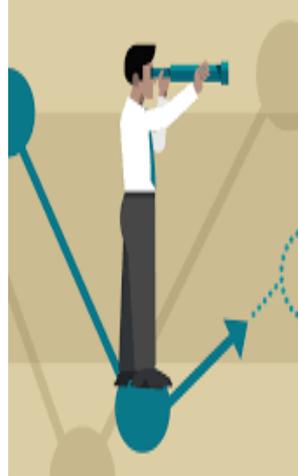
1. **Masa Depan Potensial (*Potential Future*):** Situasi masa depan yg berbeda dgn situasi sosial yg memang terjadi.
2. **Masa Depan Masuk Akal (*Plausible Future*):** Situasi masa depan yg atas dasar asumsi akan terjadi apabila pembuat kebijakan tdk melakukan intervensi.
3. **Masa Depan Normatif (*Normative Future*):** Situasi masa depan yg seharusnya terjadi.

CONTOH JENIS Masa Depan



1. **Masa Depan Potensial (*Potential Future*):** sebagai akibat penebangan hutan yg terus menerus, maka berbagai jenis masa depan **mungkin dapat terjadi**, misalnya erosi, bencana alam, kekurangan persediaan air, musnahnya satwa, *global warming*.
2. **Masa Depan Masuk Akal (*Plausible Future*):** erosi, bencana alam, kekurangan persediaan air, *global warming*, *musnahnya satwa sangat logis dapat terjadi apabila pemerintah tidak melakukan kontrol thd penebangan hutan*. Sebaliknya, bila pemerintah melakukan kontrol thdp mnj penebangan hutan, maka masuk akal juga akibat negatif tsb diatas dapat diminimalkan atau dihindari.
3. **Masa Depan Normatif (*Normative Future*):** apabila lebar jalan raya diperluas, mnj lalu lintas disempurnakan, pertumbuhan jmlh kendaraan dikontrol ketat, mk jumlah lakalantas di masa depan akan berkurang.

OBJEK Peramalan/Forecasting



1. **Konsekuensi kebijakan sekarang:** ramalan yg digunakan utk mengestimasi kondisi yg akan datang, apabila tdk ada kebijakan baru (*status quo*).
2. **Konsekuensi kebijakan baru:** ramalan yg digunakan utk mengestimasi kondisi yg akan datang apabila diterapkan kebijakan baru.
3. **Isi kebijakan baru:** ramalan yg digunakan utk mengestimasi perubahan dlm isi kebijakan baru.
4. **Perilaku stakeholders:** ramalan yg digunakan utk mengestimasi dukungan (*suport*) / penolakan (*resistency*) yg mungkin timbul dgn adanya kebijakan baru.

Alternatif Kebijakan atau POLICY ALTERNATIVE sebagai Hsl Peramalan



- ***Policy Alternative***: informasi yg dirumuskan sbg alternatif yg memungkinkan utk diambil ttg arah kegiatan yg dilakukan utk menyelesaikan mslh.
- Ketika *Policy Makers* dihadapkan pada masalah yg tidak terstruktur, maka ia dituntut mengembangkan berbagai alternatif kebijakan sebelum sampai pada pilihan kebijakan yg tepat.
- Ini tidak mudah, karena *Policy Makers* dituntut untuk mempunyai pengetahuan yg luas yg berhubungan dengan masalah yg sedang dihadapi.

PENGEMBANGAN Alternatif Kebijakan



- Alternatif kebijakan **dihasilkan dari Formulasi dan Legitimasi Kebijakan**, dimana dilakukan kegiatan:
 1. Pengumpulan & analisis informasi yg berhubungan dgn mslh,
 2. Pengembangan alternatif-alternatif kebijakan,
 3. Membangun dukungan dgn dilakukannya negosiasi & kompromi,
 4. Dipilihnya kebijakan.
- Kebijakan yg dipilih adalah kebijakan yg **telah lolos dari proses seleksi** karena dipandang lebih unggul daripada alternatif kebijakan lain. Dalam proses seleksi sudah tentu harus mendasarkan pada kriteria yg jelas.

METODE PENGEMBANGAN Alternatif Kebijakan

(by Patton & Sawicki)

1. Metode Status Quo (*No-Action*)
2. Metode Survei Cepat (*Quick Surveys*)
3. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)
4. Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (*Comparison of Real-World Experiences*)
5. Metode *Analogy, Metaphor, and Synetics*
6. Curah Pendapat (*Brainstorming*)





1.

Metode STATUS QUO (*No-Action*)

- Suatu alternatif dipilih apabila klien, pemegang otoritas, kelompok masyarakat atau instansi merasa bahwa masalah yg ada dapat diperbaiki dengan alternatif yg tersedia.
- Untuk memilih harus dievaluasi tiap alternatif kebijakan yg ada, apakah situasi menjadi BAIK atau sebaliknya.

Alasan Memilih Metode *Status Quo* (*No-Action*)



- Tidak cukup dana untuk membuat alternatif kebijakan baru
- Dgn kebijakan *status quo* sudah dapat mencapai sasaran kebijakan/program
- Kebijakan *status quo* dapat mengurangi tindakan dan resiko
- *Status quo* merupakan solusi yg terbaik karena masalahnya pelik, shg tdk ada solusi yg optimal

2. Metode SURVEI CEPAT (*Quick Survey*)



- Analisis kebijakan dapat menanyakan kepada teman atau kelompok tertentu mengenai suatu masalah dan meminta saran bagaimana memecahkan masalah tsb.
- Merupakan ide yg baik untuk memecahkan masalah
- Menghasilkan daftar saran alternatif kebijakan untuk kemudian diolah oleh analisis kebijakan

3. TINJAUAN PUSTAKA (*Literature Review*)



- **Buku, jurnal:** pengetahuan teoritik dg berbagai kasus sosial, bisa menjadi sumber informasi utk menawarkan alternatif kebijakan.
- **Contoh:** Secara teoritis ada 3 jenis kebijakan yg bisa diambil utk mengatasi sektor informal, khususnya PKL, yakni: 1) kebijakan struktural, 2) kebijakan relokasi, 3) kebijakan edukatif (McGee & Yeung, dalam Subarsono, 1998:92)

Tinjauan Pustaka (Literature Review)



- **Kebijakan Struktural:** kebijakan utk mengontrol aktivitas sektor informal melalui infrastruktur legal dan administratif.
- **Kebijakan Relokasi:** kebijakan utk menata kembali tempat beroperasinya sektor informal.
- **Kebijakan Edukatif:** kebijakan utk mengubah sikap dan pengetahuan mereka sehingga akan mengubah pola perilaku mereka.

Mana yg dipilih ?

4. Perbandingan dengan Pengalaman Nyata (*Comparison of Real-World Experiences*)

- Memperoleh informasi ttg alternatif kebijakan yg nyata yg telah dilaksanakan dgn *setting* sosial yg hampir sama.
- Tidak mencari alternatif terbaik, namun alternatif yg bisa diterapkan.
- Contoh: *Centralized Planning Approach (CPA)* mnjd *Decentralized Planning Approach (DPA)* by Rondinelli dan Cheema, 1983:10



5. Metode *ANALOGY*, *METAPHOR* & *SYNETICS*

- **Analogi dan Metapor** digunakan untuk memecahkan masalah baik dlm mendefinisikan masalah maupun dlm mengidentifikasi kemungkinan alternatif.
- Para pendukung ini berpendapat bahwa **para analis kebijakan seringkali gagal menemukan solusi thd suatu mslh sebab mereka tidak mengenal bahwa mslh yg dihadapi sebenarnya mslh lama.**
- **Synetics** adalah metode pemecahan masalah dlm kelompok melalui diskusi sehingga kesempatan utk menemukan alternatifnya meningkat.

6. Curah Pendapat (*Brainstorming*)



- Metode *brainstorming* dapat dilakukan melalui konferensi yg kreatif guna menghasilkan serangkaian daftar (*checklist*) ide/gagasan utk memecahkan masalah.
- ***Rank brainstorming*** bervariasi dari pembicaraan informal, pertemuan cepat dan terbatas, teratur para anggota, pakar & konsultan
- Shg hasil diskusinya mnjd **alternatif kebijakan.**

UTS Analisis Kebijakan Publik: Takehome / Tugas Mandiri

1. Buat uraian **perumusan masalah kebijakan** yg mencakup 4 tahapan (situasi masalah, meta masalah, masalah substantif & masalah formal) dari pengamatan pada lingkungan domisili Anda! Sajikan dalam bentuk tabel dan awali dgn menyebutkan lokasi/wilayah pengamatan masalahnya.
2. Pilih 1 isu/masalah kebijakan lingkup nasional yg Anda anggap dapat dijadikan sebagai agenda sistematis dan/atau agenda pemerintah dan uraikan hal-hal yg mendasarinya sehingga layak di-**agenda setting**-kan.

Kerjakan max 2 lembar kertas A4 dgn margin standar, jenis huruf Arial 12 spasi teks 1,5. Jadikan format PDF. Identitas mahasiswa tulis di kanan atas. Kirim ke email dr.fajarapr99@yahoo.com paling lambat Senin, 14 Maret 2023. Beri nama file dgn format: UTS AKP Kelas A – NIM NAMA LENGKAP

TERIMA KASIH

Semoga ilmu ini bermanfaat.

